



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 24 Desember 2020

Halaman: 1

Segera Susun Payung Hukum

PEMERINTAH Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) segera menyusun payung hukum untuk mengendalikannya sampah.

Langkah tersebut dilakukan pasca membludaknya sampah di Kota Yogyakarta sejak Jumat (18/12) lalu.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dalam diskusi pemecahan sampah beberapa hari yang lalu, muncul opsi agar masyarakat saat membuang sampah di-

kenakan tarif.

Aji mencontohkan di negara Jepang yang sudah menerapkan mekanisme pembuangan sampah yang unik. Di Jepang bagi setiap masyarakat yang hendak membuang sampah wajib membeli tas khusus.

"Kalau menaruh sampah tidak pakai tas itu, tidak akan diambil oleh tukang sampah. Tapi tas"

● ke halaman 11

Segera Susun

● Sambungan Hal 1

nya mahal, kalau misal tas biasa Rp25 ribu, maka mereka jual Rp50 ribu. Nah harga tas itu sebetulnya untuk biaya mengolah sampah," tegasnya.

Strategi tersebut membuat orang menjadi berpikir dua kali untuk menimbun sampah, karena harga tas khususnya yang mahal.

Namun demikian, untuk menerapkan aturan tersebut tidak mudah karena Aji menilai kemampuan masyarakat di DIY berbeda-beda.

"Nanti tetap akan diatur dengan Perda, dan Pergub. Tapi tetap melihat kemampuan masyarakat. Karena pemerintah itu kan tidak boleh membuat masyarakat kesulitan. Itu sudah terpikirkan," ujarnya.

Sementara ditanya terkait penanganan TPST Piyung-

an, Aji menegaskan Pemda DIY masih tetap pada rencana awal terkait Kerjasama Badan Usaha Pemerintah.

Meski hal itu dinilai sebagian kalangan dewan prosesnya terbilang lambat karena prosesnya hingga kini masih pra studi kelayakan.

"Ke depan coba pikirkan pengembangan lagi di sana. Kami tetap tawarkan KPBU ke investor, supaya sampah itu bukan ditumpuk tapi diolah," tegasnya.

Sedangkan untuk penanganan sementara, Aji menjelaskan selama ini Pemda DIY belum menentukan metode pengolahan sampah, ia mengimbau agar setiap keluarga sudah memilah sampah sejak dari hulu.

Ia berharap setiap rumah tangga sudah harus memisahkan sampah organik dan non organik. Hal itu ditekankan supaya TPST Piyungan tidak bermasalah

karena sudah terlalu over load.

Sementara terkait persoalan drainase, pihaknya menjelaskan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh PUPESDM dan DLHK DIY.

"Sudah dibenahi. Jadi kalau ada air hujan sudah masuk ke drainase kemudian dibuang. Kalau kemarin kan mengalir ke pemukiman," tukasnya.

Sementara itu, Pjt DLHK DIY Hananto Hadi Purnomo menambahkan, pihaknya kini baru akan fokus terkait peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) terkait talut, pembangunan bronjong dan drainase.

Ia menjelaskan, penanganan drainase pelan-pelan akan dimulai dilakukan oleh DLHK DIY dan PUPESDM.

"Persoalan drainase menjadi yang utama. Selebihnya pengamanan TPST biasa," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005